

Pengaruh Inklusi Keuangan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2016-2020
(*The Effect of Financial Inclusion and Government Expenditure on Human Development Index in Indonesia in 2016-2020*)

Marissa Widya Ulfa dan Aisyah Fitri Yuniasih

Politeknik Statistika STIS
Jl. Otto Iskandardinata No. 64C
Email: 111910922@stis.ac.id dan aisyah.fy@stis.ac.id

Naskah diterima: 6 Februari 2023
Naskah direvisi: 12 Desember 2023
Naskah diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstract

The HDI in Indonesia can't be said to be quite satisfactory. Various efforts have been made to increase HDI in Indonesia. Financial institutions have an important role to increase human welfare, so the public need easy access for that and they can be involved in financial inclusion. Regional governments must be able to manage allocations wisely for human welfare. This problem gives an idea to analyze the effect of financial inclusion which is proxied into the penetration dimension, the availability dimension, the usability dimension, and government expenditure on HDI in Indonesia in 2016-2020. The method that used in this research is panel data regression because it can see individual effects in each province of Indonesia. The result show that government expenditure and the availability dimension have a negative effect on HDI in Indonesia in 2016-2020. The penetration and usability dimension have a positive effect on HDI in Indonesia in 2016-2020. So, the government especially DPR must be able to fix allocation of government expenditure, so it can increase the HDI in that region. Financial institutions must expand access to formal financial services to all levels of society and improve the technology in financial institutions to increase HDI in a region.

Keywords: *human development index, financial inclusion, government expenditure, panel data regression*

Abstrak

IPM di Indonesia belum bisa dikatakan cukup memuaskan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan IPM di Indonesia. Lembaga keuangan memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, sehingga diperlukan kemudahan akses bagi masyarakat agar dapat terlibat dalam keuangan yang inklusif. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga harus mampu mengatur alokasi dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat. Permasalahan tersebut menimbulkan pemikiran untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan yang diprosikan menjadi dimensi penetrasi, dimensi ketersediaan, dan dimensi kegunaan serta pengeluaran pemerintah terhadap IPM di Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel karena dapat melihat karakteristik yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan dimensi ketersediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 2016-2020. Sedangkan dimensi penetrasi dan dimensi kegunaan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 2016-2020. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan pemerintah khususnya DPR mampu memperbaiki alokasi pengeluaran pemerintah agar bisa turut andil dalam meningkatkan IPM yang mencerminkan kesejahteraan pada suatu wilayah. Lembaga keuangan juga harus memperluas akses layanan keuangan formal kepada seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan teknologi pada lembaga keuangan juga dapat meningkatkan IPM pada suatu wilayah.

Kata kunci: indeks pembangunan manusia, inklusi keuangan, pengeluaran pemerintah, analisis regresi data panel

PENDAHULUAN

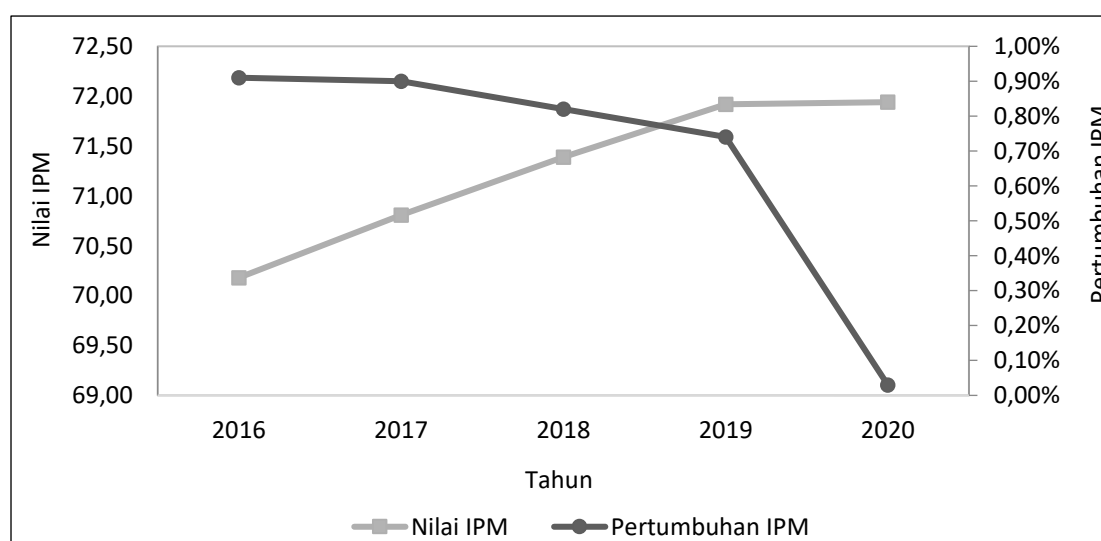
Pembangunan manusia merupakan hal penting yang bisa menjadi salah satu acuan perkembangan sebuah negara maupun daerah. Pembangunan manusia yang tertata dengan baik dapat menopang perekonomian sebuah negara maupun daerah. Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional. Penduduk bisa dikatakan berkualitas jika berkontribusi untuk kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan sebagai alat ukur kualitas sumber daya manusia yang relevan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent standard of living*). Pembangunan manusia perlu mendapat perhatian karena banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan (*Human Development Report*, 1990). Menurut Badan Pusat Statistik (2020), manfaat IPM bagi suatu negara atau daerah adalah sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, sebagai penentu peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, serta bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis

karena selain ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM merupakan indeks yang ditetapkan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP) pada tahun 1996 untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. IPM dari 189 negara di dunia disusun dalam *Human Development Report* (HDR) yaitu laporan pembangunan manusia yang mempertimbangkan kesehatan, pendidikan dan pendapatan di negara tertentu untuk memberikan ukuran pembangunan manusia yang sebanding antarnegara dari waktu ke waktu. Dalam HDR (2020) yang diterbitkan UNDP, Indonesia menempati peringkat 107 dari 189 negara di dunia serta menempati posisi kelima dari dua belas negara ASEAN. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN-5 yaitu negara-negara pendiri ASEAN, Indonesia menempati posisi terakhir dari kelima negara tersebut.

Jika ditinjau dari nilai tiap dimensi pembangun IPM, dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita merupakan dimensi yang paling memengaruhi turunnya pertumbuhan IPM. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), pengeluaran per kapita turun dari 11,30 juta rupiah menjadi 11,01 juta rupiah. Sedangkan dari sisi pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah selama 12,98 tahun yang meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya selama 12,95 tahun. Selain itu rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas juga meningkat dari 8,34 tahun menjadi 8,48 tahun. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,47 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa perkembangan nilai IPM di Indonesia dari tahun 2016-2020 mengalami tren yang positif. Tren positif ini tidak sejalan dengan pertumbuhan IPM di Indonesia tahun 2016-2020. Jika dilihat dari Gambar 1, pertumbuhan IPM dari tahun 2016-2020 selalu mengalami penurunan, terlebih lagi pada tahun 2020, pertumbuhan IPM mengalami penurunan sangat drastis yaitu dari 0,74 persen menjadi 0,03 persen. Hal ini tidak sesuai target pemerintah yang mengharapkan nilai IPM pada tahun 2020 menjadi 72,51 atau tumbuh sebesar 0,79 persen. Melambatnya pertumbuhan IPM di Indonesia tahun 2020 merupakan salah satu dampak pandemi *coronavirus disease* (COVID-19). Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah membuat peraturan untuk pembatasan sosial seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Adanya pembatasan sosial tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan bagi masyarakat sehingga membuat masyarakat memilih untuk mengurangi konsumsi. Hal ini akan berdampak pada lesunya sektor perekonomian. Namun, sebelum pandemi COVID-19 melanda, pertumbuhan IPM di Indonesia juga selalu menurun. Hal inilah yang menyebabkan kenapa IPM di Indonesia perlu dibahas karena dikhawatirkan pertumbuhan IPM akan selalu menurun padahal IPM sangat penting bagi suatu negara atau daerah.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1. Perkembangan IPM di Indonesia 2016-2020

Walaupun pertumbuhannya melambat, IPM di Indonesia secara nasional selalu mengalami peningkatan. Namun, di sejumlah daerah masih memiliki tingkat pembangunan manusia di bawah rata-rata

nasional. BPS mencatat 11 provinsi yang memiliki IPM sedang atau berada pada kisaran 60-70. Satu-satunya daerah yang memiliki level IPM sangat tinggi adalah DKI Jakarta. Perbedaan IPM yang signifikan antar provinsi di Indonesia menggambarkan terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan belum tercapai sehingga perlu dilakukan evaluasi.

Untuk meningkatkan kembali IPM di Indonesia, dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan per kapita yaitu besarnya pendapatan rata-rata di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita juga mencerminkan tingkat daya beli penduduk di suatu daerah.

Pemerintah memiliki peran yang besar dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah daerah dengan kewenangannya di era otonomi saat ini harus mampu mendayagunakan alokasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan fiskal yang tepat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diharapkan mampu meningkatkan IPM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian. Menurut Bank Indonesia (2014), peran penting lembaga keuangan adalah untuk mengatasi kemiskinan, pertumbuhan perekonomian, pemerataan pendapatan dan tercapainya stabilitas sistem keuangan. Peran penting lembaga keuangan harus disertai dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga diperlukan kemudahan akses bagi masyarakat agar dapat terlibat di dalamnya serta mencapai kondisi keuangan yang inklusif yaitu kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (World Bank, 2015).

Saat ini inklusi keuangan menjadi salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia. G20 adalah forum kerja multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Agenda prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia adalah mendorong inklusi ekonomi dan keuangan khususnya bagi kelompok penduduk yang selama ini belum terlayani secara baik di dalam keuangan. Berdasarkan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), nilai Indeks Inklusi Keuangan di Indonesia mencapai 76,29 persen pada tahun 2019. Namun nilai tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura yang mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara dengan nilai Indeks Inklusi Keuangan yang tinggi memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi pula.

Dari uraian di atas menimbulkan sebuah pemikiran untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan inklusi keuangan terhadap IPM di Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini mencakup 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan asumsi Provinsi Kalimantan Utara masih tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur karena adanya keterbatasan pada kesediaan data untuk variabel independen yaitu data DPK, jumlah kantor cabang perbankan, dan jumlah kredit pada Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam karakteristik antarprovinsi. Untuk melihat adanya efek dari tiap provinsi tersebut, model regresi data panel merupakan model yang tepat. Menurut Baltagi (2005), salah satu kelebihan pada model regresi data panel adalah dapat mengatasi keragaman dari setiap unit individu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi gambaran umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pengeluaran pemerintah dan inklusi keuangan di Indonesia tahun 2016-2020. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan inklusi keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2016-2020. Hasil analisis penelitian ini diharapkan bahwa pemerintah khususnya DPR mampu memperbaiki alokasi pengeluaran pemerintah agar bisa turut andil dalam meningkatkan IPM yang mencerminkan kesejahteraan pada suatu wilayah. Lembaga keuangan juga harus memperluas akses layanan keuangan formal kepada seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan teknologi pada lembaga keuangan juga dapat membantu peningkatan IPM pada suatu wilayah.

Irsyadinna (2019) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia periode 2012-2017 dengan objek penelitian 14 provinsi di Indonesia yang memiliki Indeks Inklusi Keuangan di atas Indeks Inklusi Keuangan di Indonesia. Menggunakan model regresi data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Sementara variabel kredit, jumlah nasabah, dan jumlah pengguna alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Siswa dan Agustin (2020) dalam penelitiannya yang menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap Indeks Pembangunan

Manusia di Indonesia tahun 2015-2018 dengan menggunakan metode regresi data panel. Dimensi yang digunakan adalah dimensi penetrasi (dana pihak ketiga terhadap populasi penduduk dewasa), dimensi ketersediaan (kantor cabang perbankan terhadap populasi penduduk dewasa) serta dimensi kegunaan (jumlah kredit terhadap PDRB). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga dimensi berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara parsial, dimensi penetrasi dan kegunaan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 2015-2018. Sedangkan dimensi ketersediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 2015-2018. Mononimbar, dkk (2022) melakukan analisis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Minahasa Selatan. Melalui persamaan regresi berganda, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Minahasa Selatan. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS), *website* DJPK Kementerian Keuangan, publikasi DDA setiap provinsi di Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data tersebut berupa data panel yang terdiri dari 33 provinsi di Indonesia sebagai unit *cross-section* serta data *time series* menggunakan data tahunan periode tahun 2016-2020. Untuk memperjelas data yang digunakan beserta sumber dan satuannya tercantum pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Ringkasan Variabel Penelitian.

No.	Data	Sumber Data	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Website Badan Pusat Statistik	-
2.	Pengeluaran Pemerintah	Website DJPK Kementerian Keuangan	Miliar Rp
3.	Dana Pihak Ketiga	Otoritas Jasa Keuangan	Miliar Rp
4.	Jumlah Kantor Cabang Bank	Otoritas Jasa Keuangan	Unit
5.	Jumlah Kredit	Otoritas Jasa Keuangan	Miliar Rp
6.	Produk Domestik Regional Bruto	Website Badan Pusat Statistik	Miliar Rp
7.	Jumlah Penduduk Dewasa	Publikasi DDA setiap provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021	Jiwa

Metode Analisis

Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi gambaran umum IPM serta variabel-variabel yang memengaruhinya di Indonesia tahun 2016-2020. Dalam analisis deskriptif peneliti menggunakan bantuan peta tematik dan grafik kuadran. Sedangkan analisis inferensia ditujukan untuk menganalisis pengaruh variabel inklusi keuangan serta pengeluaran pemerintah terhadap IPM di Indonesia selama periode 2016-2020. Metode yang digunakan pada analisis inferensia ini adalah analisis regresi data panel dengan tingkat signifikansi 5 persen.

Data panel merupakan data yang diperoleh dari data *cross-section* yang diobservasi berulang pada unit individu yang sama dalam waktu yang berbeda. Singkatnya data panel merupakan gabungan *cross-section* dengan data *time series*. Menurut Gujarati (2009) data panel memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinieritas antarvariabel, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien. Dengan mempelajari observasi *cross-section* yang berulang, data panel cocok untuk mempelajari dinamika perubahan. Tahapan analisis regresi data panel adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi Variabel Dependen dan Variabel Independen serta Pembentukan Model

Adapun model regresi data panel yang akan dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPM_{it} = (\alpha + \mu_i) - \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} - \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Di mana:

α : intersep model

μ_i : efek spesifik individu provinsi ke-i (i = 1, 2, ..., 33)

β_p	: slope dari variabel independen ke-p ($p = 1, 2, 3, 4$)
$X1_{it}$	: jumlah pengeluaran pemerintah provinsi ke-i tahun ke-t ($i = 1, 2, \dots, 33; t = 1, 2, \dots, 5$)
$X2_{it}$	: dimensi penetrasi provinsi ke-i tahun ke-t ($i = 1, 2, \dots, 33; t = 1, 2, \dots, 5$)
$X3_{it}$	: dimensi ketersediaan provinsi ke-i tahun ke-t ($i = 1, 2, \dots, 33; t = 1, 2, \dots, 5$)
$X4_{it}$	: dimensi kegunaan provinsi ke-i tahun ke-t ($i = 1, 2, \dots, 33; t = 1, 2, \dots, 5$)
u_{it}	: komponen error provinsi ke-i tahun ke-t ($i = 1, 2, \dots, 33; t = 1, 2, \dots, 5$)

Data pada penelitian ini melanggar asumsi normalitas serta memiliki satuan yang berbeda antar variabel, maka peneliti melakukan transformasi untuk mengatasi masalah tersebut. Transformasi yang digunakan adalah transformasi logaritma natural. Sehingga model yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$\ln IPM_{it} = (\alpha + \hat{\mu}_i) - \beta_1 \ln X1_{it} + \beta_2 \ln X2_{it} - \beta_3 \ln X3_{it} + \beta_4 \ln X4_{it} + u_{it} \dots \dots (3)$$

2. Pemilihan Model Terbaik

Dalam analisis regresi data panel, kemungkinan model yang terbentuk ada tiga, yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Untuk mengetahui model terbaik maka perlu dilakukan beberapa pengujian yaitu uji *Chow* untuk menguji model CEM atau FEM yang lebih baik, uji *Hausman* untuk menguji model FEM atau REM yang lebih baik dan uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (Uji BP-LM) untuk menguji model CEM atau REM yang lebih baik.

3. Pengujian Struktur Varians-Kovarians Residual

Apabila model yang terpilih adalah FEM maka perlu dilakukan uji struktur varians-kovarians residual melalui uji LM dan uji λ_{LM} . Uji LM digunakan untuk mengetahui struktur varians-kovarians residual bersifat homoskedastik atau heteroskedastik. Sedangkan uji λ_{LM} digunakan untuk menguji estimator terbaik berdasarkan struktur varians-kovarians residual yang bersifat heteroskedastik, apakah terdapat *cross-sectional correlation* atau tidak.

4. Pengujian Asumsi Klasik

Jika metode estimasi yang terpilih adalah *Ordinary Least Squares* (OLS) maka asumsi klasik yang harus terpenuhi adalah normalitas, homoskedastisitas, non-multikolinieritas, dan non-autokorelasi. Namun jika metode yang terpilih selain metode estimasi OLS maka hanya dilakukan pengujian asumsi normalitas dan non-multikolinieritas.

5. Pengujian Keberartian Parameter dan Penilaian Ketepatan Model

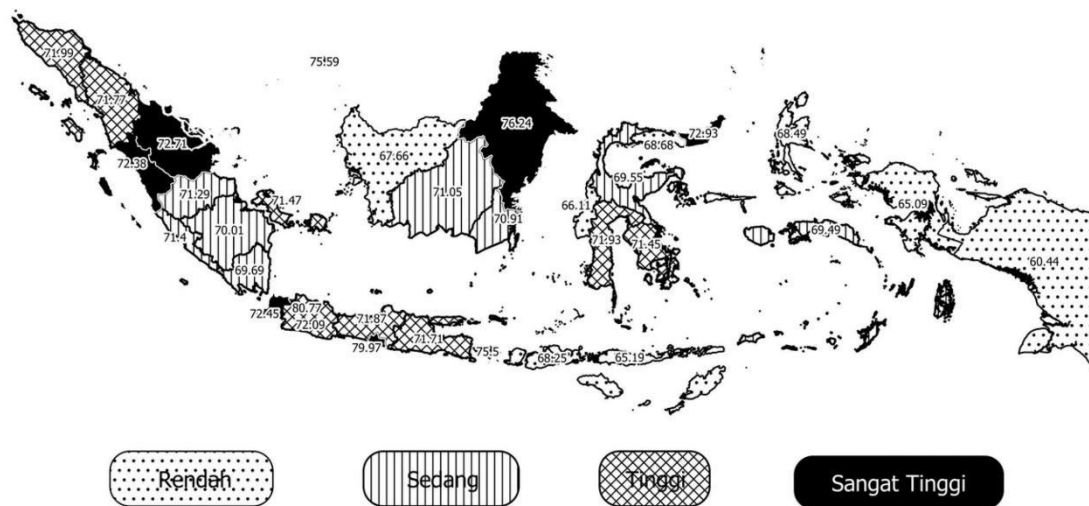
Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen signifikan secara simultan maka dilakukan uji F. Sedangkan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial menggunakan uji t. Sementara itu, penilaian ketepatan model dilakukan dengan melihat nilai *Adjusted R²*.

6. Interpretasi Hasil dari Model Regresi Data Panel yang Diperoleh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia, Inklusi Keuangan, dan Pengeluaran Pemerintah

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sebaran nilai IPM di setiap provinsi di Indonesia masih belum merata. Nilai IPM di bagian barat Indonesia cenderung tinggi bahkan untuk Provinsi DKI Jakarta sudah tergolong sangat tinggi. Namun, ada beberapa yang memiliki kategori IPM sedang seperti Lampung dan Kalimantan Barat. Sedangkan pada wilayah bagian timur Indonesia didominasi oleh nilai IPM yang lebih rendah daripada bagian barat Indonesia. Rata-rata setiap provinsi menempati kategori nilai IPM sedang.



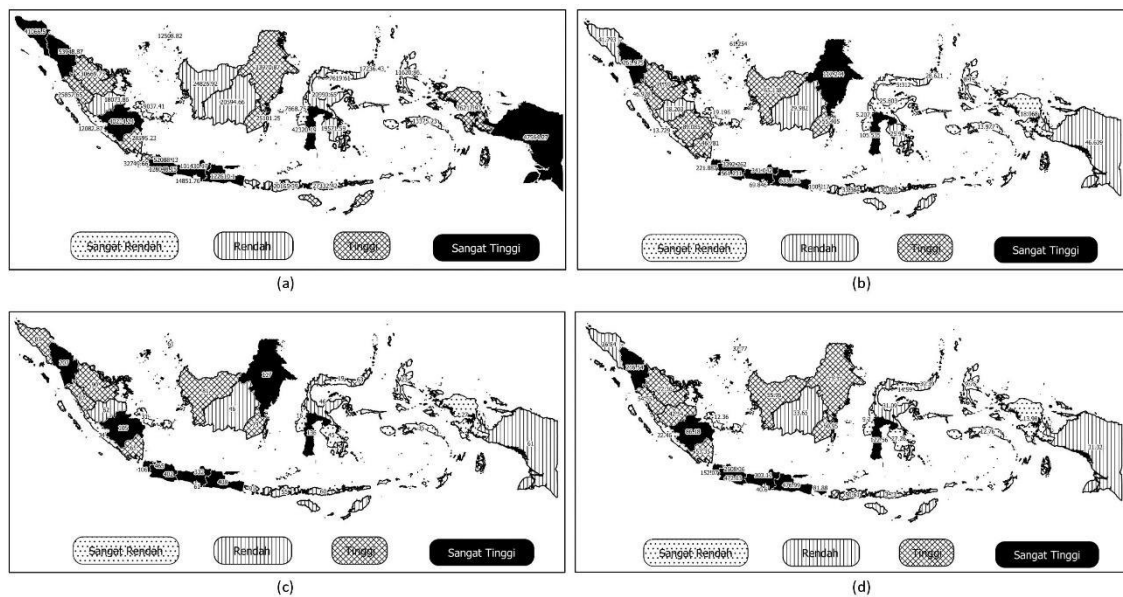
Sumber: BPS, diolah

Gambar 2. Sebaran IPM di Indonesia, 2020

Gambar 3 menunjukkan sebaran setiap variabel independen yang digunakan pada penelitian. Gambar 3(a) menunjukkan sebaran pengeluaran pemerintah di Indonesia pada tahun 2020. Provinsi yang berada di pulau Sumatera memiliki pengeluaran pemerintah yang bervariasi. Sedangkan di pulau Jawa dan pulau Papua cenderung memiliki pengeluaran pemerintah yang tinggi. Pengeluaran pemerintah pada provinsi di pulau Kalimantan didominasi oleh kategori sedang. Sedangkan untuk pulau Sulawesi dan sekitarnya cenderung rendah.

Berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPR mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada pembahasan kali ini akan fokus pada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Melalui fungsi anggaran, DPR dapat membahas dan memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Setelah itu, melalui fungsi pengawasan, DPR harus mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah harus dialokasikan secara tepat baik pada daerah yang memiliki pengeluaran pemerintah yang berada pada kategori tinggi maupun daerah yang memiliki pengeluaran pemerintah yang rendah. Dengan alokasi yang tepat, pengeluaran pemerintah akan membawa pengaruh yang baik terhadap IPM di suatu daerah. Sebaliknya jika alokasinya tidak tepat maka pengeluaran pemerintah akan berdampak negatif terhadap IPM.

Gambar 3(b), 3(c), dan 3(d) merupakan gambaran untuk sebaran nilai yang merepresentasikan setiap dimensi inklusi keuangan yaitu jumlah DPK yang merepresentasikan dimensi penetrasi, jumlah kantor cabang perbankan yang merepresentasikan dimensi ketersediaan serta jumlah kredit yang merepresentasikan dimensi kegunaan. Kawasan barat Indonesia cenderung menempati posisi kategori tinggi. Sedangkan kawasan timur Indonesia didominasi oleh nilai yang berada pada kategori rendah. Hal ini dapat menjadi acuan lembaga keuangan dan pemerintah dalam memberikan perhatian lebih untuk provinsi-provinsi yang masih berada pada kategori rendah atau bahkan sangat rendah di setiap variabel.



Sumber: (a) DJPK Kemenkeu, (b) (c) (d) OJK

Gambar 3. Sebaran Nilai Variabel Dependen: (a) Pengeluaran Pemerintah, (b) Jumlah DPK, (c) Jumlah Kantor Cabang Perbankan, (d) Jumlah Kredit

Variabel-Variabel yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2016-2020

1. Pemilihan Model Terbaik

Dalam analisis regresi data panel, kemungkinan model yang terbentuk ada tiga, yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), *random effect model* (REM). Untuk mengetahui model terbaik maka perlu dilakukan beberapa pengujian yaitu uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (Uji BP-LM).

Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel Terbaik.

Uji	H ₀	H ₁	Statistik uji	<i>p-value</i>	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Chow</i>	CEM	FEM	263,637152	0,0000*	Tolak H ₀
<i>Hausman</i>	REM	FEM	23,643950	0,0001*	Tolak H ₀

Keterangan: * = signifikansi pada taraf uji 5 persen

Tabel 2 memperlihatkan bahwa uji *Chow* memberikan keputusan tolak H₀ dilihat dari nilai *p-value* pada uji tersebut, yaitu sebesar 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05. Sehingga dengan tingkat signifikansi 5 persen FEM lebih baik digunakan pada penelitian ini dibandingkan CEM. Karena yang terpilih adalah FEM, maka lanjutkan dengan uji *Hausman* untuk menguji apakah model FEM atau REM yang lebih baik. Pada uji *Hausman*, *p-value* yang dihasilkan adalah 0,0001 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 maka memberikan keputusan tolak H₀. Sehingga dengan tingkat signifikansi 5 persen, FEM lebih baik digunakan pada penelitian ini dibandingkan REM. Karena yang terpilih adalah FEM, maka perlu dilakukan uji struktur matriks varians-kovarians residual.

Tabel 2. Hasil Uji Struktur Varians-Kovarians Residual.

Uji	H ₀	H ₁	Statistik Uji	Chi square	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
LM	Homoskedastis	Heteroskedastis	56,30349	46,1943	Tolak H ₀
λ_{LM}	Tidak terdapat <i>cross-sectional correlation</i>	Terdapat <i>cross-sectional correlation</i>	799,719	582,5641	Tolak H ₀

Keterangan: * = signifikansi pada taraf uji 5 persen

Tabel 3 menunjukkan bahwa diperoleh keputusan tolak H₀ pada uji λ_{LM} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5 persen terdapat *cross-sectional correlation* pada model terpilih. Sehingga

parameter regresi pada model FEM akan diestimasi dengan metode estimasi FGLS SUR yaitu *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) dengan penimbang berupa *Seemingly Unrelated Regression* (SUR) karena struktur varians-kovariansnya bersifat heteroskedastis dan tidak terdapat *cross-sectional correlation*.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Metode estimasi yang terpilih adalah FGLS SUR yaitu *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) dengan penimbang berupa *Seemingly Unrelated Regression* (SUR) maka uji asumsi yang dilakukan adalah normalitas dan non-multikolinieritas. Uji normalitas menggunakan uji *Jarque-Bera* dengan hasil statistik uji sebesar 4,2766 dan *p-value* sebesar 0,1179. Sehingga dengan tingkat signifikansi 5 persen didapatkan keputusan gagal tolak H_0 yang artinya residual berdistribusi normal. Sedangkan asumsi non-multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4 Terlihat bahwa nilai VIF tiap variabel dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan asumsi non-multikolinieritas terpenuhi.

Tabel 3. Nilai VIF dari Variabel Independen.

Variabel Independen	VIF
(1)	(2)
Pengeluaran Pemerintah	1,6894
Dana Pihak Ketiga	6,7426
Jumlah Kantor Cabang Perbankan	8,5994
Jumlah Kredit	1,8207

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *p-value* pada uji F (*F-statistic*) sebesar 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5 persen, variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah, DPK (dimensi penetrasi), jumlah bank (dimensi ketersediaan), dan jumlah kredit (dimensi kegunaan) berpengaruh signifikan terhadap IPM secara bersama-sama atau setidaknya terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kemudian uji t pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5 persen, variabel pengeluaran pemerintah, DPK (dimensi penetrasi), jumlah bank (dimensi ketersediaan), dan jumlah kredit (dimensi kegunaan) berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 2016-2020.

Tabel 4. Hasil Estimasi Parameter FEM dengan Metode Estimasi FGLS SUR

Variabel	Koefisien	Standar error	Uji t*	p-value*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	4,4987	0,0346	129,8680	0,0000
LnPP	-0,0361	0,0069	-5,2025	0,0000*
LnDPK	0,0727	0,0049	14,8085	0,0000*
LnBank	-0,0663	0,0044	-15,2224	0,0000*
LnKredit	0,0105	0,0031	3,3425	0,0011*
Ringkasan Statistik				
R^2	0,997693	<i>F-statistic</i>		1537,946
<i>Adjusted R²</i>	0,997045	<i>p-value</i>		0,00000*

Keterangan: * = signifikansi pada taraf uji 5 persen

Adapun nilai *adjusted R²* untuk model yang terpilih adalah sebesar 99,70 persen (Tabel 5). Artinya, variasi dari keempat variabel independen, yaitu pengeluaran pemerintah dan inklusi keuangan yang diprosikan menjadi dimensi penetrasi, dimensi ketersediaan, dan dimensi kegunaan dapat menjelaskan variasi sebesar 99,70 persen sedangkan 0,30 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam model. Hasil estimasi regresi data panel dengan model FEM dan metode estimasi FGLS SUR adalah sebagai berikut.

$$IPM_{it} = (4,5085 + \hat{\mu}_i) - 0,0361LnPP_{it}^* + 0,0727LnDPK_{it}^* - 0,0663LnBank_{it}^* + 0,0105LnKredit_{it}^* \dots \dots \dots (4)$$

* = signifikansi pada taraf 5 persen

Dimana:

- $\overline{IPM}_{it}$: Indeks Pembangunan Manusia provinsi ke-i tahun ke-t
 $\hat{\mu}_i$: efek spesifik individu ke-i
 PP_{it} : jumlah pengeluaran pemerintah provinsi ke-i tahun ke-t
 DPK_{it} : dimensi penetrasi provinsi ke-i tahun ke-t
 $Bank_{it}$: dimensi ketersediaan provinsi ke-i tahun ke-t
 $Kredit_{it}$: dimensi kegunaan provinsi ke-i tahun ke-t

Persamaan (4) menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai IPM di Indonesia. Hubungan negatif antara kedua variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresinya yaitu sebesar -0,0361. Artinya, apabila jumlah pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar satu persen maka nilai IPM akan mengalami penurunan sebesar 0,0361 poin dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Priambodo (2015) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pada periode penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Priambodo yaitu tahun 2007-2013, belanja pemerintah memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya serta nilai IPM yang juga terus meningkat. Sehingga koefisien regresi pada model penelitian memiliki nilai yang positif. Berbeda dengan penelitian ini, dimana pada periode penelitian yaitu 2016-2020, terlihat bahwa dana realisasi pengeluaran pemerintah mengalami penurunan pada tahun 2020 namun IPM tetap meningkat walaupun pertumbuhan IPM menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan realisasi belanja daerah disebabkan oleh keraguan pemerintah daerah untuk membelanjakan anggarannya ketika pendapatan tidak pasti di tengah pandemi COVID-19. Komposisi belanja daerah pun lebih terfokus kepada belanja lainnya yang mencakup belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja lainnya, belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan. Sedangkan belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal mengalami penurunan. Tabel 5 menunjukkan perubahan komposisi alokasi pengeluaran pemerintah dari tahun 2019 dan 2020. Anggaran pemerintah banyak dialihkan untuk menangani bencana pandemi COVID-19. Terdapat banyak biaya tak terduga saat pandemi melanda. Perubahan inilah yang menyebabkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap IPM pada periode penelitian 2016-2020. Zulyanto (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa alokasi anggaran yang besar memerlukan pemanfaatan yang efisien dan efektif. Jika terjadi inefisiensi yang tinggi dan tidak efektif, maka sangat memungkinkan peningkatan anggaran justru berpengaruh negatif terhadap nilai IPM.

Pada FEM diasumsikan intersep antar individu berbeda sedangkan *slope*-nya sama. Perbedaan intersep antar individu menunjukkan adanya perbedaan karakteristik dari setiap provinsi di Indonesia. Hasil *output* menunjukkan bahwa Provinsi DI Yogyakarta memiliki efek individu yang tertinggi yaitu sebesar 0,0928. Hal ini berarti Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai IPM tertinggi jika semua variabel independen diasumsikan konstan. Sedangkan efek individu terkecil adalah Provinsi Papua Barat dengan nilai sebesar -0,1212. Hal ini berarti Provinsi Papua Barat memiliki nilai IPM terkecil jika semua variabel independen diasumsikan konstan.

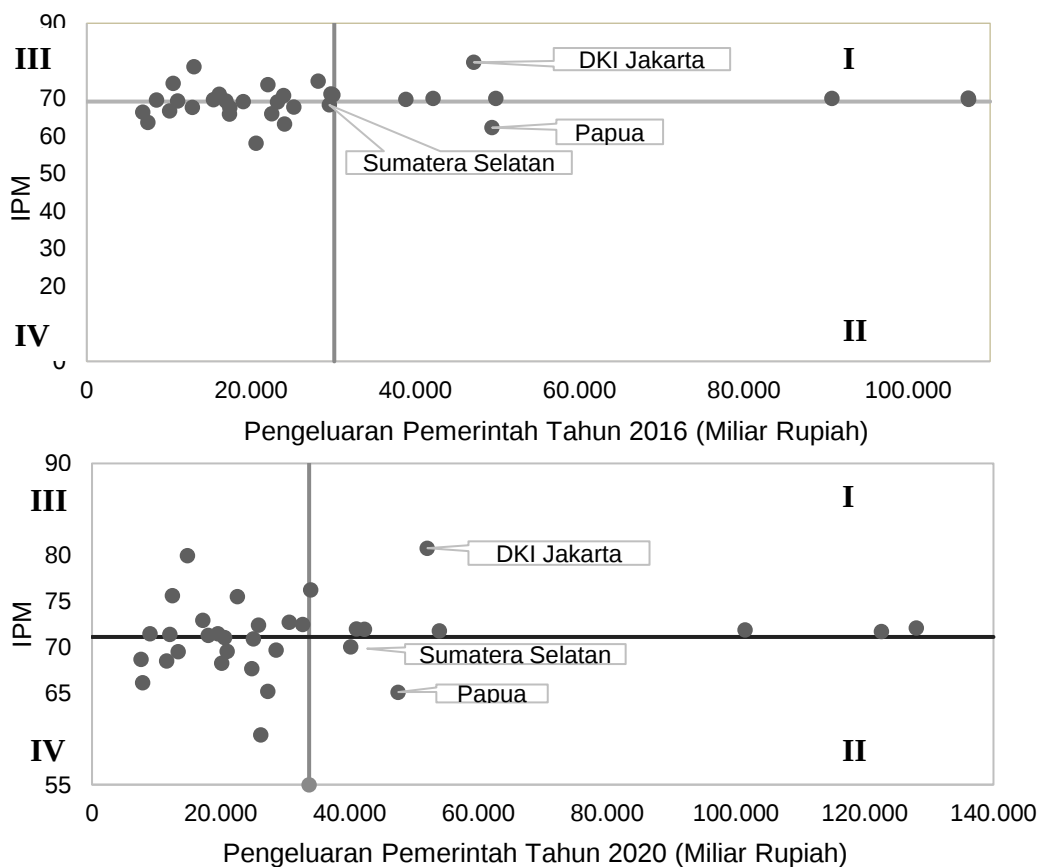
Tabel 5. Alokasi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia, 2019-2020

No.	Alokasi Pengeluaran Pemerintah	2019 (Miliar Rupiah)	2020 (Miliar Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belanja Pegawai	384.969,02	373.299,49
2	Belanja Barang Jasa	304.786,76	274.965,47
3	Belanja Modal	218.913,81	157.572,05
4	Belanja Lainnya	279.353,70	316.120,87
	Belanja Bunga	419,58	491,35
	Belanja Subsidi	3.360,63	4.248,36
	Belanja Hibah	74.152,40	88.688,79
	Belanja Bantuan Sosial	11.691,83	12.523,59
	Belanja Lainnya	-	67,76
	Belanja Tidak Terduga	867,34	36.700,52
	Belanja Bagi Hasil	55.933,58	45.464,86
	Belanja Bantuan Keuangan	132.928,34	127.935,65

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2019-2020.

Gambar 4 menunjukkan pola data menggunakan analisis kuadran antara pengeluaran pemerintah terhadap IPM pada tahun 2016 dan 2020. Analisis kuadran bertujuan untuk menemukan wilayah kritis yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat berdasarkan grafik kuadran antara pengeluaran pemerintah dengan IPM. Pembagian kuadran terdiri dari empat bagian yaitu:

- Kuadran I (IPM tinggi, pengeluaran pemerintah tinggi)
- Kuadran II (IPM rendah, pengeluaran pemerintah tinggi)
- Kuadran III (IPM tinggi, pengeluaran pemerintah rendah)
- Kuadran IV (IPM rendah, pengeluaran pemerintah rendah)



Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah

Gambar 4. Analisis Kuadran Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM di Indonesia, 2016 & 2020

Kondisi kuadran II perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat dalam hal ini DPRD khususnya badan anggaran karena kuadran tersebut merupakan kondisi dimana nilai IPM suatu daerah tergolong rendah. Pada tahun 2016, dapat dilihat bahwa hanya terdapat satu provinsi yang berada pada kuadran II yaitu Provinsi Papua. Sedangkan tahun 2020 Provinsi Papua masih menempati kuadran II dan ditambah oleh Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi dengan pengeluaran pemerintah yang tinggi harus mampu mengalokasikan anggarannya secara efektif dan efisien sehingga dengan bertambahnya pengeluaran pemerintah diharapkan mampu meningkatkan IPM pada daerah tersebut.

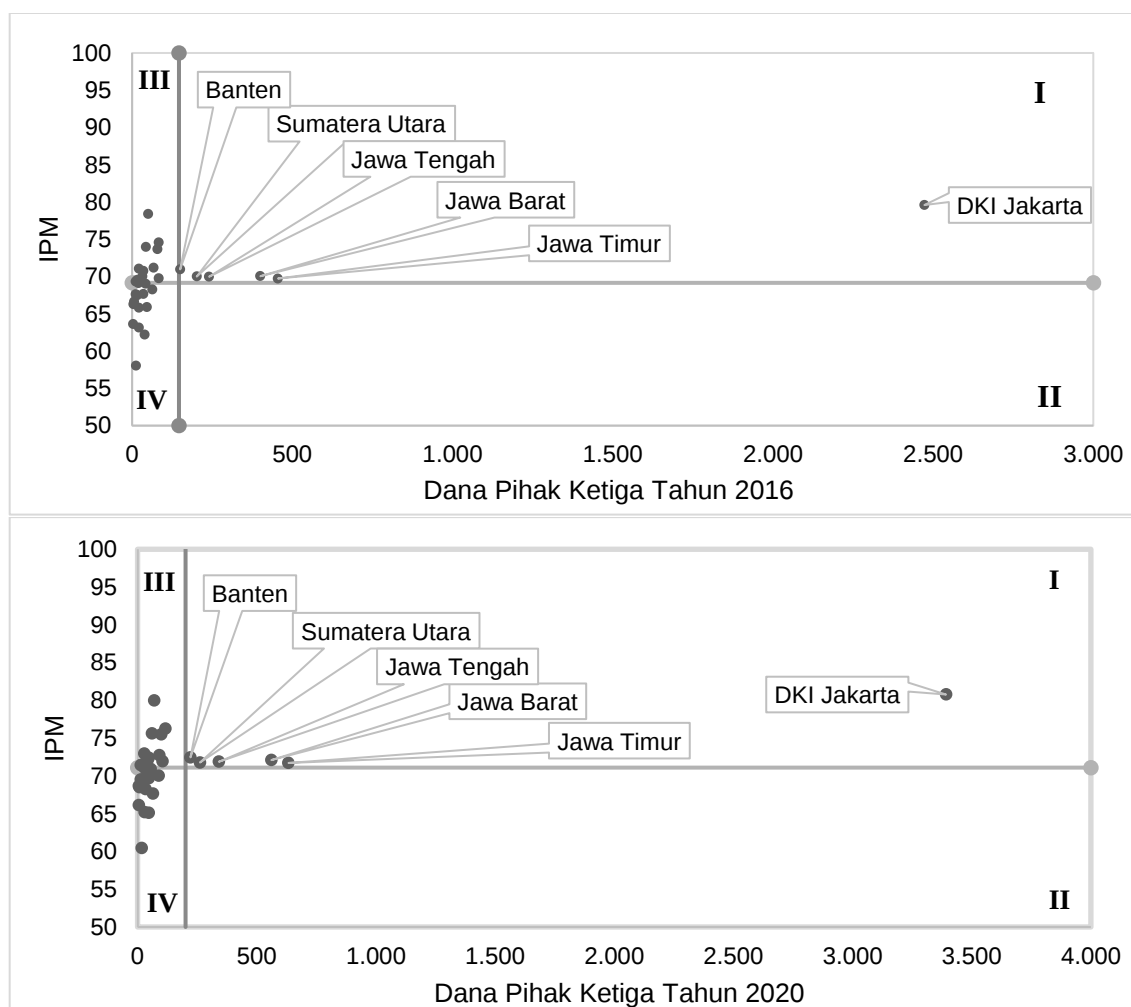
Dimensi penetrasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Hubungan positif antara kedua variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,0727. Artinya, apabila jumlah DPK (dimensi penetrasi) mengalami peningkatan sebesar satu persen maka nilai IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,0727 poin dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sejalan dengan penelitian Siswa dan Agustin (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel dimensi penetrasi yang diwakilkan oleh DPK per 1.000 populasi penduduk dewasa terhadap IPM di Indonesia. DPK dapat berupa tabungan, giro, maupun deposito. Penggunaan produk keuangan tersebut dapat membantu masyarakat mengelola konsumsi. Selain itu, dengan adanya masyarakat yang menggunakan

produk tabungan, bank dapat menyalurkannya kembali pada masyarakat untuk kegiatan ekonomi produktif dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Gambar 5 menunjukkan visualisasi tentang hubungan DPK terhadap IPM di Indonesia pada tahun 2016 dan 2020. Pembagian kuadran terdiri dari empat bagian yaitu:

- Kuadran I (IPM tinggi, DPK tinggi)
- Kuadran II (IPM rendah, DPK tinggi)
- Kuadran III (IPM tinggi, DPK rendah)
- Kuadran IV (IPM rendah, DPK rendah)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2020 tidak ada provinsi yang berada pada kuadran II yaitu daerah dengan jumlah DPK tinggi tetapi nilai IPM rendah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah DPK yang tinggi tidak akan menyebabkan IPM suatu daerah akan rendah. Pada kuadran I terdapat enam provinsi yang konsisten dengan nilai IPM serta DPK yang lebih dari nilai rata-ratanya pada tahun 2016 dan 2020, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Lima dari enam provinsi tersebut merupakan provinsi yang ada di pulau Jawa yang artinya DPK di pulau Jawa lebih berkembang pesat dibandingkan dengan provinsi yang ada di pulau lain. Hal ini disebabkan oleh sebaran penduduk Indonesia yang masih terkonsentrasi di pulau Jawa.



Sumber: OJK, diolah

Gambar 5. Analisis Kuadran DPK terhadap IPM di Indonesia, 2016 & 2020

Provinsi yang berada pada kuadran IV perlu mendapat perhatian yang lebih karena memiliki jumlah DPK yang rendah dan IPM yang rendah pula. Pada tahun 2016 dan 2020 terdapat 14 provinsi yang konsisten menempati kuadran IV yaitu Sumatera Selatan, Lampung, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Keempat belas provinsi tersebut merupakan provinsi yang berada pada wilayah timur Indonesia. Hal

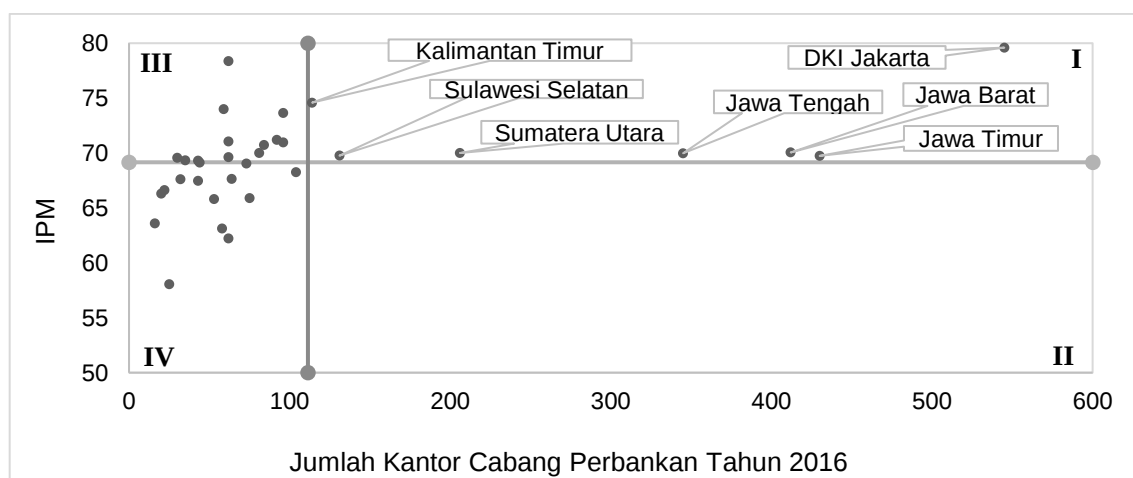
ini perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah maupun lembaga keuangan yang ada pada daerah tersebut. Lembaga keuangan harus mampu meningkatkan jumlah DPK agar bisa berkontribusi untuk meningkatkan IPM daerahnya. Semakin tinggi jumlah DPK maka semakin banyak dana yang bisa disalurkan kembali kepada masyarakat. Nasabah biasanya akan membandingkan secara cermat imbal hasil yang ditawarkan oleh bank dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat menaikkan imbal hasil, menurunkan tingkat suku bunga atau upaya lain agar masyarakat tertarik untuk menyimpan uang mereka di lembaga keuangan.

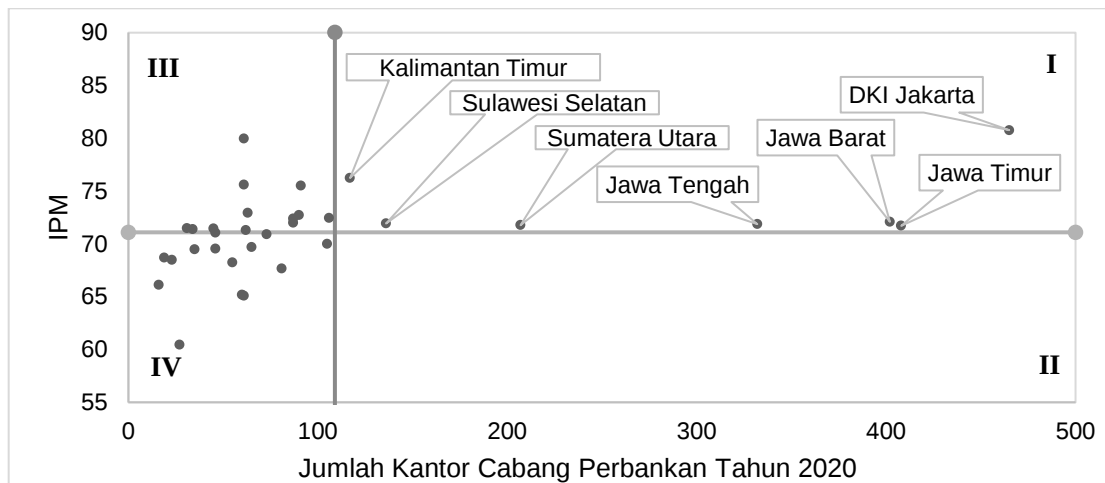
Dimensi ketersediaan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM. Hubungan antara kedua variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar $-0,0663$. Artinya, apabila jumlah kantor cabang perbankan (dimensi ketersediaan) mengalami peningkatan sebesar satu persen maka nilai IPM akan mengalami penurunan sebesar $0,0663$ poin dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Dz (2018) menyatakan bahwa kehadiran teknologi informasi harus dimanfaatkan oleh perbankan karena dengan adanya teknologi dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar perbankan. Sehingga ketersediaan layanan perbankan tidak hanya terpaku pada keberadaan kantor cabang perbankan. Dengan adanya pengurangan kantor cabang perbankan dan memanfaatkan layanan perbankan melalui teknologi akan memberikan dampak yang baik bagi pihak bank maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Rahadiyan dan Sari (2019) dalam penelitian mereka juga menyatakan bahwa bank dapat meningkatkan efisiensi melalui pengurangan jumlah kantor cabang. Sekaligus sebagai upaya dalam menekan biaya operasional perusahaan dan akhirnya meningkatkan laba, serta akan berimbas pada turunnya suku bunga yang diberlakukan pada bank tersebut.

Gambar 6 menunjukkan visualisasi tentang hubungan jumlah kantor cabang perbankan terhadap IPM di Indonesia pada tahun 2016 dan 2020. Pembagian kuadran terdiri dari empat bagian yaitu:

- Kuadran I (IPM tinggi, jumlah kantor cabang perbankan tinggi)
- Kuadran II (IPM rendah, jumlah kantor cabang perbankan tinggi)
- Kuadran III (IPM tinggi, jumlah kantor cabang perbankan rendah)
- Kuadran IV (IPM rendah, jumlah kantor cabang perbankan rendah)

Sama halnya dengan variabel dimensi penetrasi yang direpresentasikan oleh jumlah DPK, terlihat bahwa tidak ada provinsi yang berada pada kuadran II yaitu daerah dengan jumlah kantor cabang perbankan tinggi tetapi nilai IPM rendah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kantor cabang perbankan yang tinggi tidak akan menyebabkan IPM suatu daerah akan rendah. Pada tahun 2016 dan 2020 terdapat tujuh provinsi yang konsisten menempati posisi kuadran I di mana nilai IPM serta jumlah kantor cabang perbankan yang lebih dari nilai rata-ratanya, yaitu Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.





Sumber: OJK, diolah

Gambar 6. Analisis Kuadran Jumlah Kantor Cabang Perbankan terhadap IPM di Indonesia, 2016 & 2020

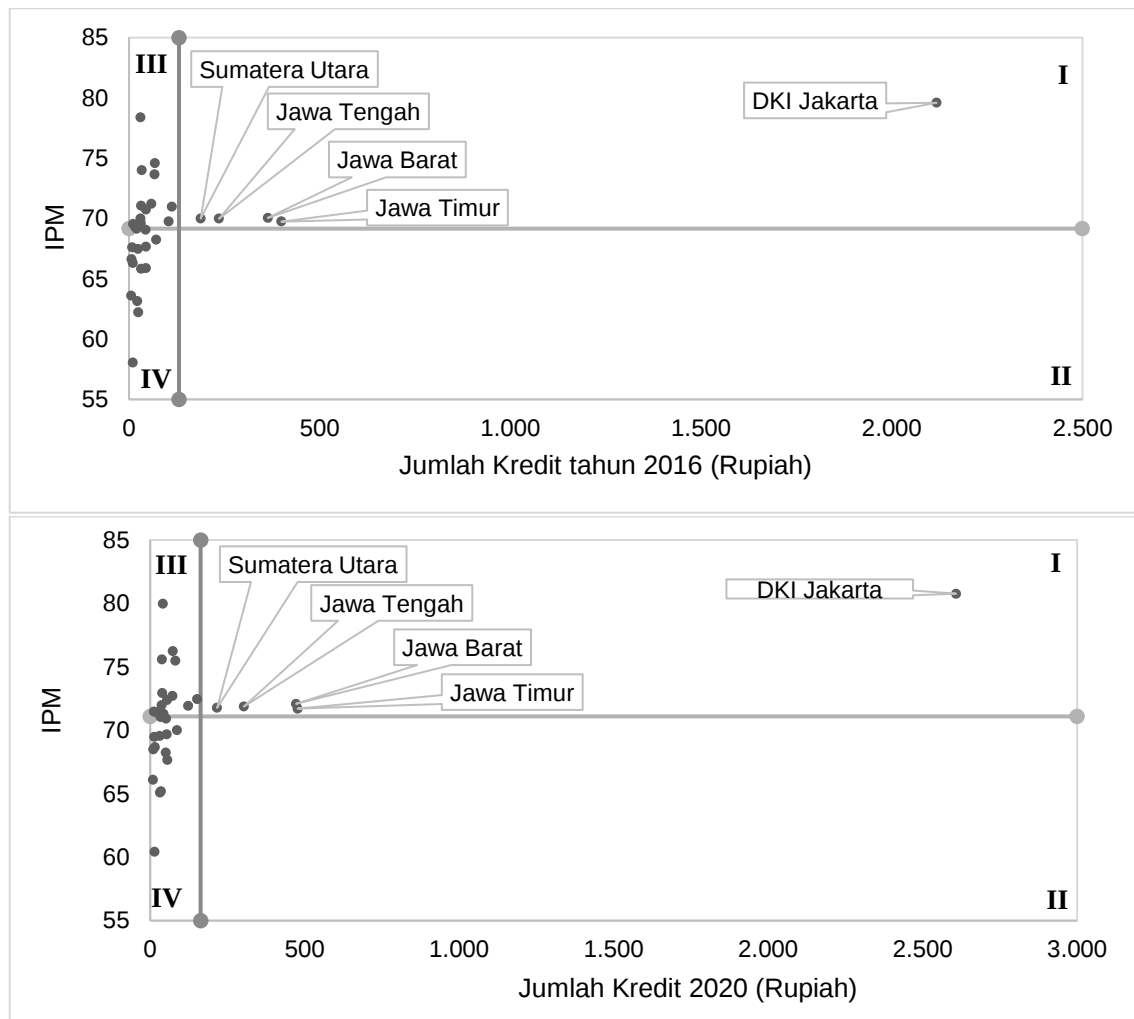
Dimensi kegunaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Hubungan positif antara kedua variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,0105. Artinya, apabila jumlah kredit (dimensi kegunaan) mengalami peningkatan sebesar satu persen maka nilai IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,0105 poin dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irsyadinna (2019) yang menunjukkan bahwa variabel kredit berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Kredit berasal dari DPK yang dihimpun oleh perbankan. Dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk membiayai kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Memiliki akses ke kredit memungkinkan untuk merencanakan pengeluaran dan rencana pendidikan yang memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik dan melalui kredit pula suatu negara dapat mengembangkan semangat kewirausahaan sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha. Sehingga dengan adanya peningkatan kredit akan mendorong perputaran ekonomi yang lebih baik dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui IPM.

Gambar 7 menunjukkan visualisasi tentang hubungan jumlah kredit terhadap IPM di Indonesia pada tahun 2016 dan 2020.

- Kuadran I (IPM tinggi, jumlah kredit tinggi)
- Kuadran II (IPM rendah, jumlah kredit tinggi)
- Kuadran III (IPM tinggi, jumlah kredit rendah)
- Kuadran IV (IPM rendah, jumlah kredit rendah)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2020 tidak ada provinsi yang berada pada kuadran II yaitu daerah dengan jumlah kredit tinggi tetapi nilai IPM rendah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kredit yang tinggi tidak akan menyebabkan IPM suatu daerah akan rendah. Pada kuadran I terdapat lima provinsi yang konsisten dengan nilai IPM serta jumlah kredit yang lebih dari nilai rata-ratanya pada tahun 2016 dan 2020, yaitu Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Provinsi yang berada pada kuadran IV perlu mendapat perhatian yang lebih karena memiliki jumlah kredit yang rendah dan IPM yang rendah pula. Pada tahun 2016 dan 2020 terdapat 14 provinsi yang konsisten menempati kuadran IV yaitu Sumatera Selatan, Lampung, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah maupun lembaga keuangan yang ada pada daerah tersebut. Lembaga keuangan harus mampu meningkatkan jumlah kredit agar bisa berkontribusi untuk meningkatkan IPM daerahnya. Kredit dapat digunakan sebagai salah satu modal dalam mengembangkan suatu usaha serta dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya dalam aspek pendidikan maupun kesehatan. Sehingga dengan tingginya jumlah kredit di suatu daerah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.



Sumber: OJK, diolah

Gambar 7. Analisis kuadran jumlah kredit terhadap IPM di Indonesia, 2016 & 2020

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan dimensi ketersediaan (jumlah kantor cabang perbankan) berpengaruh negatif terhadap IPM di Indonesia tahun 2016-2020. Sedangkan variabel dimensi penetrasi (jumlah DPK) dan dimensi kegunaan (jumlah kredit) memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Indonesia tahun 2016-2020. Berdasarkan analisis deskriptif, sebaran nilai setiap variabel di Indonesia yang dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Nilai setiap variabel di Pulau Jawa didominasi dengan nilai yang berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Sebaliknya, pulau-pulau yang berada pada bagian timur Indonesia khususnya Pulau Papua didominasi dengan nilai yang berada pada kategori rendah bahkan kategori sangat rendah. Untuk pulau lain memiliki nilai yang bervariasi. Visualisasi hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu IPM menunjukkan hasil bahwa Provinsi DKI Jakarta selalu menempati kuadran IV pada setiap variabel, yang artinya Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai IPM yang tinggi serta nilai setiap variabelnya juga tinggi. Pada variabel pengeluaran pemerintah, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Papua menempati kuadran II yang artinya provinsi tersebut memiliki pengeluaran pemerintah yang tinggi tetapi nilai IPM yang masih di bawah rata-rata. Sedangkan pada variabel yang merepresentasikan setiap dimensi inklusi keuangan terlihat bahwa tidak ada provinsi yang berada pada kuadran II, yaitu daerah dengan nilai variabel inklusi keuangan yang tinggi tetapi nilai IPM rendah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel inklusi keuangan yang tinggi tidak akan menyebabkan IPM suatu daerah akan rendah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah melalui badan anggaran, DPRD setiap daerah pada era otonomi saat ini harus mampu mendayagunakan alokasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Alokasi yang mengalami banyak perubahan pada tahun 2020 yang merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 harus diatur kembali alokasinya kepada belanja yang meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Khususnya untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Papua yang memiliki pengeluaran pemerintah yang tinggi namun nilai IPM yang masih rendah. Sedangkan untuk lembaga keuangan harus memperluas layanan keuangan formal pada seluruh lapisan masyarakat. Mempermudah akses kredit pada provinsi yang memiliki IPM rendah agar bisa mencapai nilai IPM yang memuaskan. Selain itu, peningkatan teknologi pada lembaga keuangan juga harus menjadi perhatian lebih agar dapat meningkatkan IPM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baltagi, B. H. (2013). *Econometric Analysis of Panel Data (5th ed)*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
 Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th)*. Boston: Pearson Addison Wesley

Jurnal dan Working Paper

- Agustin, G. (2020). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 121-130.
 Bakar, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 4(2), 16-38.
 Cao, T. H. V., Trinh, Q. L., & Nguyen, T. A. L. (2017, June). The effect of FDI on Inequality Adjusted HDI (IHDI) in Asian countries. In *Vietnam Economist Annual Meeting 10th*.
 Dz, A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63-80.
 Lubis, D., & Ramadhoni, M. G. (2019). Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Syariah dengan Pembangunan di Negara Anggota OKI. *AL-MUZARA'AH*, 7(2), 1-16.
 Mahendra, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 174-186.
 Maulana, R., & Nuryakin, C. (2021). The effect of saving account ownership and access to financial institutions on household loans in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 24(3), 465-486.
 Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163-176.
 Mononimbar, T.Y., Lopian, A. L. C. P., Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 22(3)
 Nanda, K., & Kaur, M. (2016). Financial inclusion and human development: A cross-country evidence. *Management and Labour Studies*, 41(2), 127-153.
 Natalia, M. A., T., F. Kurniasari, & Hendrawaty, E. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Dengan Menggunakan Social Capital Sebagai Variabel Mediator. *ULTIMA Management*, Vol. 16, No. 1
 Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222.
 Palenewen, T. O., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IPM dan dampaknya terhadap kemiskinan di sulawesi utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
 Rahadiyan, I., & Sari, A. R. (2019). Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Defendonesia*, 4(1), 18-28.
 Riswantio, A., Tanjung, H., & Devi, A. (2021). Dampak Inklusi Keuangan dan Bank Syariah terhadap Kesehatan dan Pendidikan Nasional. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 1-26.

- Sanggelorang, S., Rumat, V., & Siwu, H. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi*, 2(2), 86-101.
- Siswa, I. & Agustin, G. (2020). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 121-130.
- Sohilauw, M. I. (2018). Moderasi Inklusi Keuangan Terhadap Hubungan Literasi Keuangan dan Keputusan Struktur Model UKM. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBIMA)*, Vol. 6, No. 2.
- Zahara, S. N., Ruhadi, R., & Setiawan, S. (2021). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(1), 164-177.
- Zulyanto, A. (2016). Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2).

Sumber Lain

- Irsyadinnas, A. (2019). *Analisis Peran Inklusi Keuangan Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia Tahun 2012-2017* [Skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya.
- Priambodo, A. (2015). *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013)* [Skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya
- Sukmawidjaja, A. F. (2018). *Dampak kegiatan inklusi keuangan terhadap pengembangan usaha Mikro dan kecil, pembangunan manusia (pendidikan dan kesehatan), dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. SKRIPSI-2018*.

Sumber Digital

- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia. Diperoleh tanggal 11 Maret 2022, dari Keuangan Inklusif (bi.go.id)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2020). Anggaran dan Realisasi APBD. Diperoleh tanggal 24 Mei 2022, dari Portal data SIKD (kemenkeu.go.id)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Data Statistik Perbankan Indonesia. Diperoleh tanggal 01 Maret 2022, dari Statistik Perbankan Indonesia (ojk.go.id)
- United Nation Development Programs. (2020). Human Development Report 2020. Journal of Government Information. Diperoleh tanggal 19 Februari 2022, dari Human Development Reports (undp.org)